

Jelang Debat Kedua, PKS Singgung Jokowi soal Blunder

CNN Indonesia | Kamis, 31/01/2019 13:31 WIB



Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin. (CNN Indonesia TV)

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Jamil menyarankan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin menyiapkan data valid sebanyak mungkin jelang penyelenggaraan debat capres kedua 17 Februari mendatang.

"Kalau masing-masing capres tidak punya informasi valid dan komperhensif sebaiknya tidak disampaikan dalam forum debat. Nanti akan blunder lagi yang dia ucapkan," ucap Nasir di Kompleks Parlemen, Kamis (31/1).

Pernyataan Nasir menyinggung 'blunder' yang dinilai dilakukan Jokowi pada debat perdana, 17 Januari silam. Blunder tersebut, kata dia, ketika Jokowi menyoal banyaknya kader Partai Gerindra yang meloloskan banyak calon legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi.

Lihat juga: [MK Tolak Gugatan Syarat Remisi Napi Korupsi](#)



Nasir Djamil. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (30/1) malam, data caleg mantan napi korupsi dari Partai Gerindra berjumlah enam orang. Sementara itu, Partai Golkar yang notabenenya mengukung Jokowi, dihuni delapan orang caleg mantan napi korupsi.

"Itu seperti orang bunuh diri. Jadi ingin menembak lawan tapi pelurunya mengenai diri sendiri. Sayangnya Pak Jokowi tidak membaca data. Partai pendukung Pak Jokowi ternyata punya caleg mantan tipikor yang enggak kalah banyaknya," ucap Nasir.

Diketahui, enam caleg mantan napi korupsi dari Partai Gerindra adalah Mohamad Taufik, Herry Jones Johnny Kereh, Husen Kausaha, Ferizal, Mirrhamudin, dan Al Hajar Syahyan.

Sementara itu, delapan caleg mantan napi korupsi dari Partai Golkar ialah Hamid Usman, Desy Yusandi, Agus Mulyadi, Petrus Nauw, Heri Baelanu, Dede Widarso, Saiful T Lami, dan Edy Muklison.

Lihat juga: [Sempat Tertunda, KPU Umumkan Caleg Eks Koruptor Hari Ini](#)

Seperti diketahui, pada debat pertama, Joko Widodo mempertanyakan kepada Prabowo Subianto soal caleg-caleg dari Partai Gerindra yang berstatus mantan narapidana koruptor.

Menurut Jokowi, berdasarkan data ICW ada sejumlah caleg eks koruptor maju dalam pencalonan, dan semua disetujui oleh Prabowo selaku Ketua Umum. Pertanyaan itu sempat memancing reaksi Prabowo, yang kemudian ramai dialihkan dengan gestur joget di arena debat. Prabowo saat itu menjawab menyatakan membiarkan rakyat yang memilih yang menentukan.



Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

(CNN Indonesia/Safir Makki)

KPU bakal menyelenggarakan debat capres kedua pada 17 Februari di Hotel Sultan, Jakarta. Debat ini hanya akan diikuti kedua calon presiden yakni Jokowi dan Prabowo. Mereka bakal menjelaskan visi, misi, dan program mengenai energi, sumber daya alam, pangan, dan infrastruktur.

KPU juga membuat perubahan format dalam debat calon presiden kedua nanti. Pada debat nanti, Jokowi dan Prabowo mendapat kesempatan satu segmen khusus untuk saling berdebat tanpa batasan waktu.

Format ini merupakan pengembangan dari segmen empat dan lima dalam debat capres-cawapres pertama. Dua segmen itu sebelumnya dikhususkan untuk kedua kandidat saling bertanya dan menanggapi.

Seperti diketahui, pada debat sebelumnya, para kandidat dibatasi waktu 60 detik hingga 120 detik untuk berbicara. Pembatasan waktu bicara itu yang akan dihapus.

Lihat juga: [Para Guru Besar Disiapkan Jadi Panelis Debat Capres Kedua](#)

(chr/ain)